

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

Kartu Lansia Jakarta Harus Merata

JAKARTA – Jumlah penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) harus dibuat rata agar menjamin hak dan kebutuhan masyarakat berusia lanjut. “Jadi, Pemprov Jakarta mesti membuat rata sehingga semua lansia menerima KLJ,” pinta anggota Komisi E DPRD Jakarta, Abdul Aziz Muslim.

“Sejumlah wilayah Jakarta Barat belum terlaksana pendistribusian KLJ secara merata,” kata Abdul di Jakarta, Rabu. Abdul menuturkan sejumlah wilayah Jakarta Barat seperti untuk Kecamatan Kalideres, Cengkareng, dan Tambora banyak lansia belum menerima KLJ.

Dia berharap program tersebut bisa diberlakukan secara merata kepada penerima manfaat. Sebab bantuan sosial seperti ini sangat dibutuhkan ketika menghadapi banyak kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga. Dengan adanya KLJ masyarakat lansia akan terbantu.

Tak jarang dia juga menerima keluhan warga lanjut usia yang tidak terdaftar menjadi penerima manfaat. Selain itu, banyak yang tidak mengerti meka-

nisme pendaftarannya.

“Ada lansia tidak punya anak. Rumahnya cuma sepetak. Suaminya sakit dan kerjanya hanya pemulung. Jadi, Pemprov Jakarta belum merata dalam pendataan penerima KLJ,” ujarnya. Untuk itu, dia terus mendesak pemprov agar memperbaiki data penerima KLJ, agar tak ada lansia tertinggal.

Dia berharap, Pemprov Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) melakukan pemerataan distribusi KLJ untuk memenuhi hak warga lansia mengingat mereka rutin membayar pajak setiap tahun. Selain itu, dia mengimbau lurah dan camat agar lebih intensif turun langsung ke lapangan. Mereka harus melihat kondisi warga dan mendata rakyat yang tak mampu agar bisa mendapat bantuan segera.

“Kalau hanya di kantor, enggak turun ke masyarakat, mereka tidak akan tahu kondisi warganya,” ujarnya. Setiap penerima bantuan sosial akan menerima dana pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) sebesar 300 ribu per orang yang didistribusikan melalui reke-

ning Bank DKI setiap bulan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lestari mengatakan, terus melakukan verifikasi dan validasi lapangan secara selektif agar Bansos PKD tepat sasaran. “Tahun lalu penerima bantuan sosial sebanyak 240.749 jiwa, paling banyak KLJ,” jelasnya.

Untuk nama yang belum terdaftar dan layak menerima bansos akan dilakukan pendataan kembali oleh Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Sosial. ■ Ant/G-1